

PERKEMBANGAN HUBUNGAN MILITER DENGAN SIPIL DI INDONESIA

**David Setiawan, Christopher Octavianus, Demas Janis, Guguh Winadi,
Yanuar Abdullah, Taufik Umasugi, Handika Suyuti**

*Mahasiswa FISIP
UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: davidsetiawan66@yahoo.com

ABSTRACT

The military has an active and making role's the politics in Indonesian government at New Order Era. Writers such as Huntington's theory marking read about the military-Civil Affairs on citizens with Agency Theory. In Indonesia, wave of reform also participated in the larger open space for discussion civil-military relations are associated with the democratic process. During this civil-military relations is not only built on military doctrine, which doctrine is less popular among the civil society and its main doctrine was never a debate among the public discourse. So that explains that military professionals can happen if they do not interfere in politics so future formation of a democratic government that includes the rule of law, public accountability in terms of the delicate balance of military autonomy in personnel policy, determining the level of power, issues of education and military doctrine and ultimately think and formulate and determine policy in the field of defense that civil-military relations that harmony must be built within the framework of democracy and mutual trust and mutual cooperation.

Keywords: *Civil-Military relations, Civil Democracy Control*

Ketika kekuasaan Orde Baru, militer memiliki peran aktif dan pembuatan politik dalam pemerintahan Indonesia. Penulis seperti teori Huntington Tanda membaca tentang militer-Urusan Sipil pada warga dengan Teori Ajensi. Di Indonesia, gelombang reformasi juga berpartisipasi dalam ruang terbuka pada ruang lebih besar untuk diskusi hubungan sipil-militer yang terkait dengan proses demokrasi. Selama ini hubungan sipil-militer tidak hanya dibangun di atas doktrin militer, namun juga masyarakat sipil. Sehingga menjelaskan bahwa profesional militer dapat terjadi jika mereka tidak ikut campur dalam politik. Ini juga mempengaruhi pembentukan masa depan suatu pemerintahan demokratis yang mencakup hukum, akuntabilitas publik, militer dalam kebijakan personel, penentuan tingkat kekuasaan, masalah pendidikan yang akhirnya dapat menetapkan kebijakan di bidang pertahanan dalam hubungan sipil-militer yang harmonis.

Kata-Kata Kunci: *Hubungan Sipil-Militer, Kontrol Sipil Demokrasi*

Saat rezim Orde Baru berkuasa militer memiliki peran yang aktif dan penting dalam politik pemerintahan Indonesia. Banyak jabatan-jabatan sipil seperti gubernur, bupati, dan menteri diduduki oleh anggota militer aktif. Harold Crouch (1999) menulis bahwa di tahun 1968, terdapat 17 Gubernur (71%) yang merupakan anggota militer.

Pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, hanya ada empat dari total 26 provinsi (15%) yang memiliki gubernur berlatar belakang sipil. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru terdapat berbagai usaha untuk menempatkan militer dibawah kontrol sipil. Salah satu contoh adalah larangan bagi anggota militer yang masih aktif untuk mengikuti Pemilu, mencalonkan diri sebagai pejabat negara, maupun duduk dalam birokrasi. Kontrol sipil atas militer pun terjadi di bidang pertahanan dan keamanan (hankam) yang sangat erat kaitannya dengan fungsi utama militer. Salah satu kasus yang menarik baru-baru ini adalah pengajuan pembelian *tank* Leopard bekas dari Belanda oleh pihak militer.

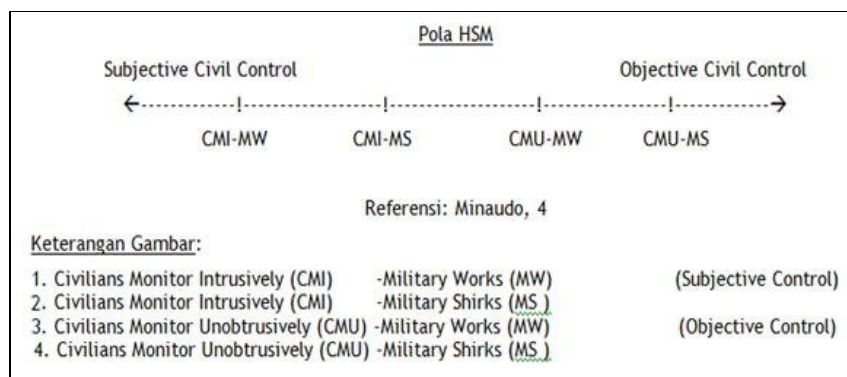
Pihak militer menganggap industri militer Indonesia belum bisa membuat *main battle tank* sendiri. Selain itu, pihak militer beralasan bahwa pembelian ini merupakan rencana jangka panjang dalam rangka transfer teknologi pembuatan *main battle tank*. Sedangkan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana tersebut dengan alasan kondisi geografis dan infrastruktur Indonesia tidak cocok untuk *main battle tank* melainkan lebih cocok untuk penggunaan *tank* kelas *medium*. Di kelas *medium*, industri militer Indonesia sudah mampu memproduksi *tank* sehingga tidak perlu melakukan impor.

Dari kasus ini, terlihat ada ketidaksepahaman antara perspektif kelompok militer dan sipil dalam membuat *grand design* perencanaan industri pertahanan di Indonesia. Dari kasus ini pula terlihat bahwa kini sipil mampu memberlakukan kontrol terhadap kebijakan yang diambil pihak militer. Riset ini meneliti mengenai hubungan sipil dan militer Indonesia di bidang industri pertahanan. Untuk mempersempit fokus bahasan, maka jangka waktu yang diambil adalah pasca rezim Orde Baru (1998-2012). Rumusan masalah tulisan ini adalah sejauh mana perkembangan hubungan militer dengan sipil di Indonesia yang dibagi dengan beberapa data dan analisis sederhana.

Riset dan Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer (HSM)

Riset dan studi tentang Hubungan Sipil-Militer (HSM) sangat berlimpah dan banyak sekali. Hampir semua negara tertarik dan berminat untuk mempelajari khususnya yang terjadi di negerinya sendiri, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Cina, dan negara-negara lainnya yang sedang mengembangkan demokrasinya, tidak peduli berbasis negara liberal, sosialis, komunis, agama atau diantaranya. Penulis teori tentang HSM seperti Huntington tentang warga negara teori ajensinya yang menjelaskan ada empat (4) pola HSM seperti tergambar dibawah ini:

Gambar 1. Teori Ajensi



Sumber : Peter Feaver dan Richard Kohn dalam Zipwald (2011)

Teori Ajensi diatas menjelaskan arah (kecenderungan) kontrol sipil subyektif akan bergerak semakin ke kiri dan kontrol obyektif bergerak semakin ke kanan. Bentangan dua (2) kutub kontrol tersebut dibagi dalam empat kategori mulai dari CMI-MW (ekstrem subyektif) sampai dengan CMU-MS di ujung kanan (ekstrem obyektif). Selain Feaver, definisi kontrol sipil obyektif maupun subyektif sudah banyak dijelaskan Huntington. Inti dari kontrol sipil obyektif adalah meyakinkan bahwa elit militer semakin efektif dengan catatan meminimumkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional.

Riset sebelumnya tidaklah jelas mengidentifikasikan kriteria apa sebenarnya yang diperlukan guna menunjukkan bahwa HSM akan mempertajam dan mendukung proses demokrasi. Namun langkah untuk menjelaskan teori tersebut berada dalam jalur hipotetik yang sama yakni transisi dari rejim otoritarian ke bentuk pemerintahan yang demokrasi. Kunci area dalam studi berproses demokrasi adalah HSM itu sendiri. Apabila teori ini diterapkan di beberapa negara yang berbeda jauh latar belakang atau konsep strategi transformasi yang sudah tertata dalam kontrol demokrasi, misal eks-negara komunis, Cina, Afrika, dan Amerika Latin nampak betapa ketatnya teori tersebut diaplikasikan.

Di Eropa Tengah dan Eropa Timur, prasyarat diterimanya di Uni Eropa (UE) ataupun North-Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah tertatanya kontrol demokratis yang kuat terhadap kekuatan militer, diikuti transisi yang cepat dalam pengembangan kelembagaan demokrasi dan perpindahan pasar ekonomi, serta telah dijalankannya demokratisasi sipil-militer. Hungaria dan Bulgaria mencatat periode yang lebih cepat dan mengaku sukses melaksanakan kontrol demokratis tahun 1997 dan Bulgaria ditahun 2002 dengan disahkannya mereka sebagai anggota NATO. Catatan sukses negara Hungaria tersebut didapat setelah berkooperasi dengan cara yang lambat dan alot dengan partai politik yang akhirnya berhasil merubah sumpah tentara dari semula hanya loyal kepada partai komunis menjadi loyal kepada bangsa dan negara. Lain lagi apa yang terjadi di negara Indonesia sehubungan dengan isu hubungan sipil-militer.

Wiranatakusumah menyatakan bahwa tingkat kepercayaan antara elit sipil maupun elit militer sangatlah penting (Hitrov 2004). Karena itu membangun kepercayaan sangatlah penting, utamanya saat awal reformasi. Menurutnya, definisi supremasi sipil di Indonesia telah terdeviasi sehingga terkesan tidak ada keseimbangan antara elit sipil dan elit militer. Padahal sebenarnya supremasi sipil berbasis hak sipil dan ini tidak hanya berlaku bagi sipil saja (*non-uniform*) tetapi juga bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai *citizen soldiers* yang sebenarnya sipil juga. Sebab tanpa kepercayaan ini maka definisi kontrol sipil atau supremasi sipil sulit diterapkan. Faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan non-militer perlu digarisbawahi agar tidak ada kekuatan dominan dalam proses pengambilan keputusan strategis atau nasional. Bruneau (et al. 2001) mulai mengamati dan fokus kepada HSM dari tiga serangkai parameter yakni kontrol demokratis, efektif, dan efisiensi.

Kontrol demokratis artinya keputusan nasional terbaik dibuat bersama tanpa dominasi kekuatan tertentu, terukur dan disiplin kepada obyektif yang ditetapkan (efektif) serta efisien karena berorientasi kepada kegiatan yang berbobot dan terpilih dipasangkan dengan konsekuensi biaya yang minimum atau *Activities-Based Costing* (ABC)¹. Parameter terakhir yang menarik karena pembiayaan (anggaran) tidak akan menjadi sasaran kesalahan lagi, anggaran tidak lagi menjadi majikan akan tetapi

¹ *Activities-Based Costing* adalah pembiayaan sebagai konsekuensi bagi aktivitas terpilih

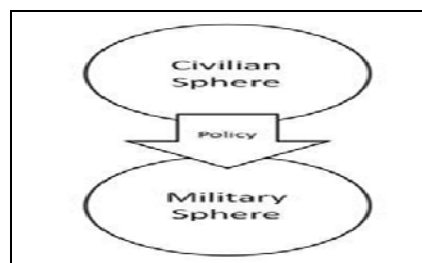
menjadi pasangan pilihan aktivitas terbaik. Organisasi yang maju sudah tidak lagi berkutat-kutat dengan anggaran dan mata anggarannya akan tetapi bergeser orientasinya kepada aktivitas terpilih yang dipasang-pasangkan dengan konsekuensi anggaran per masing masing aktivitas dan akhirnya dipilih mana aktivitas yang terbaik (efektivitasnya tertinggi) dengan pasangan anggarannya sebagai ujud konsekuensi yang paling minimal ~ menggunakan konsep ABC (*activities-based costing*). Bukan dengan dicarikan anggaran terlebih dahulu barulah ditentukan konsekuensi proyek atau kegiatan apa yang pantas mendampingi anggaran tersebut.

Bagi negara yang sudah melewati tahap krisis dan sudah menikmati demokrasi, tulisan tentang demokrasi akan terfokus pada bagaimana kontrol itu dilaksanakan. Sebaliknya negara yang baru memulai akan menggunakan fokus bagaimana obyek demokrasi bisa dicapai melalui HSM. Jarang sekali dicermati peran, tugas elit militer, dan kekuatan sekuriti yang ada dan berapa jauh efektivitas mereka mengerjakan proses transisi demokratis ini. Di awal transisi proses demokrasi di AS, para perwiranya seringkali melupakan bahwa ada dikotomi cara berpikir militer dan publik secara luas. Bahkan ada indikasi usaha mengurangi frustrasi yang sering dirasakan elit militer dalam manifestasi keterlibatannya dengan elit sipil dalam pengambilan keputusan nasional hari demi hari.

Huntington berkomentar bahwa perwira militer umumnya lebih konservatif dibandingkan kelompok besar masyarakat AS lainnya (Johnson dan Steven 1995). Bruneau bersama para akademisi lainnya mencermati bahwa fokus HSM selama ini masih berkutat-kutat kepada bagaimana melaksanakan kontrol sipil terhadap militer. Berangkat dari kenyataan itu lingkungan akademisi memformulasikan masalah bahwa sebaiknya HSM fokus kepada trinitas HSM. Cara yang mudah adalah mencermati kasus yang diputuskan melalui Wankamnas melalui kriteria trinitas tersebut dalam proses dijalankannya.

Teori-teori di atas berawal dari ide bahwa HSM seharusnya diarahkan agar bagaimana hubungan ini bisa menghasilkan suatu keputusan tentang keamanan nasional yang terbaik. Huntington, dalam *The Soldier and the State*, lebih menegaskan bahwa fokus HSM adalah hubungan antara korps perwira militer dengan negara (Andrews 2008). Sedangkan jantung dari HSM adalah konsep keperwiraan sebagai basis profesinya. Huntington melanjutkan ciri-ciri profesionalisme korps perwira adalah ciri-ciri yang sama digunakan seorang pengacara, ahli hukum, atau dokter. Dikatakan ada tiga ciri-ciri yang menonjol dari bentuk profesionalisme, yakni keahlian khusus (*expertise*), pertanggungjawaban, dan berhubungan dengan badan hukum khususnya mereka yang ada dalam kelompok perwira.

Gambar 2.
Kontrol Sipil Obyektif



Berikutnya Huntington menyebut kontrol sipil terbungkus dalam dua tipikal. Pertama adalah kontrol sipil subyektif dan kedua ialah kontrol sipil obyektif. Kontrol sipil subyektif difokuskan kepada memaksimalkan kekuatan kontrol sipil atau kelompoknya. Sedangkan kontrol sipil obyektif fokus kepada memaksimalkan profesionalisme perwira. Pembagian ini ada kaitannya dengan tidak hadirnya korps perwira yang profesional. Sehingga bentuk kontrol sipil yang paling memungkinkan adalah kontrol sipil subyektif. Inti kontrol sipil obyektif meyakinkan bahwa elit militer akan semakin efektif dengan catatan menurunkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional.

Kontrol Sipil (*Civilian Control*)

Salah satu sudut pandang dalam menilai hubungan sipil-militer adalah dengan cara melihat kontrol sipil terhadap militer. Pembahasan utama dalam konsep kontrol sipil adalah bagaimana meminimalkan *power* atau kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok militer. Dengan adanya kekuasaan sipil yang lebih tinggi dibanding militer, maka konsep kontrol sipil ini berlaku. Dalam hal ini, Huntington memberikan dua cara melakukan kontrol sipil. Jenis yang pertama adalah *Subjective Civilian Control* (Kontrol Sipil Subyektif). Menurut Huntington, cara ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan. Kontrol sipil jenis ini dilakukan dengan memperkuat kekuasaan kelompok sipil melalui penguatan institusi sipil tertentu-parlemen atau presiden-, konstitusi negara, dan atau penguatan kelompok-kelompok sipil tertentu seperti pengusaha atau birokrat (Huntington 1957). Jenis yang kedua adalah *Objective Civilian Control* (Kontrol Sipil Obyektif). Cara ini ditempuh melalui penguatan profesionalisme militer, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan kelompok sipil. Tujuan akhir dari kontrol sipil obyektif adalah memiliterkan kelompok sipil sehingga mereka dapat fokus menjadi alat negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan.

Bagan 1.
Perbedaan Umum Sipil-Militer

Criteria / Authors	Civilian control over the military	Professionalism of the military	Difference between peacetime and wartime civil-military relations	Work or shirk
Huntington	Objective control most beneficial to civil-military relations	Essential for civil-military relations	Assumes dialogue will be equal at all times because objective control maximizes military force while maintaining civilian control	Based upon the tensions between military and civilian desires
Janowitz	Subjective control : self imposed professional standards and meaningful integration with civilian values	Essential for civil-military relations	Constabulary force will eliminate the need for a distinction between peacetime and wartime interaction	Increased civilianization of the military will caused tension between the military and the civilian government
Cohen	Objective control with a more subjective approach during war.	Essential for civil-military relations	Relations are more strained during times of war, more civilian influence	Dependent upon the what the requirements are based upon military desires
Feaver	Objective control	Essential for civil-military relations	Recognizes difference in the relations	Will work or shirk based upon chance of getting caught

Sumber : Huntington, *et al*, dalam Andrews (2008)

Hubungan Sipil-Militer: Analisis Sederhana

Hubungan sipil-militer akhir-akhir ini menjadi obyek perbincangan masyarakat Indonesia di saat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi dalam pencalonan tersebut muncul tokoh-tokoh mantan TNI sebagai kandidat presiden pada bulan Juli 2004. Terkuaknya perbincangan tersebut diilhami oleh terlalu lamanya militer terlibat dalam kancah perpolitikan di Indonesia dan tuntutan penghapusan Dwi Fungsi ABRI serta adanya ungkapan lain agar militer kembali ke barak. Dalam arti lain timbulnya semangat depolitisasi militer agar militer lebih profesional di bidangnya, di sisi lain adanya pemahaman yang berbeda terhadap arti hubungan sipil-militer itu sendiri.

Berhembusnya gelombang reformasi juga turut berpartisipasi dalam membuka ruang yang lebih besar bagi pembahasan tentang wacana hubungan sipil-militer yang dikaitkan dengan proses demokrasi. Selama ini hubungan sipil-militer bukan saja dibangun di atas doktrin militer, dimana doktrin tersebut kurang populer di kalangan masyarakat utamanya masyarakat sipil serta doktrin tersebut tidak pernah menjadi wacana perbincangan di kalangan publik.

Pemahaman yang jelas dan benar tentang hubungan sipil-militer harus dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan jelas dan benar serta dapat diimplementasikan di Indonesia dengan meletakkan dan memperhatikan kepentingan nasional. Hal tersebut untuk menepis kepentingan individu maupun kelompok sehingga tidak terjerumus kepada terjadinya konflik di antara sesama bangsa. Di sisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa bukankah masyarakat Indonesia, atau yang disebut warga masyarakat, terdiri dari masyarakat sipil dan masyarakat militer sehingga terlalu berlebihan bagi kita untuk mempersoalkan hal tersebut? Namun fakta sejarah bangsa Indonesia menyatakan lain terhadap dampak kegiatan militer, sehingga dikotomi sipil-militer menjadi kental dan perlu adanya suatu interaksi yang harmonis. Sehingga diperoleh suatu masyarakat Indonesia yang utuh dengan visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia di masa depan.

Apa yang Dikehendaki dari Hubungan Sipil-Militer ?

Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka akibat bergulirnya reformasi hubungan sipil-militer, yang tidak hanya berhembus di Indonesia namun secara global dibicarakan oleh pakar-pakar politik dan militer yang hanya mengaitkannya dengan proses demokratisasi dan dampak yang diakibatkan oleh proses tersebut (Abdullah 2012). Huntington dalam tulisannya juga mengupas tentang supremasi sipil (*civilian supremacy*) atau kontrol sipil yang obyektif (*objective civilian control*) yang menyatakan bahwa supremasi sipil artinya meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik atau dengan kata lain mengakui otoritas sipil dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan di bidang pertahanan. Mengurangi intervensi militer dalam politik dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengembalikan militer ke barak yang dalam arti luas kembali dan menuju ke profesionalisme militer.

Di negara-negara yang demokrasinya telah terkonsolidasi dengan kuat, militer sepenuhnya berada di bawah sipil. Pandangan ini bertolak dari pemahaman bahwa dominasi militer atas sipil dalam politik, kontradiktif dengan alam demokrasi. Pengalaman di Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan sipil-militer ditandai dengan dominasi militer selama Orde Baru terbukti menjadi penghambat utama bagi demokrasi. Penolakan militer terhadap pandangan ini, bukan hanya akan mengganggu

hubungan sipil-militer, tetapi juga akan memunculkan persepsi di kalangan sipil bahwa militer merupakan salah satu bagian dari ancaman bagi pemerintahan yang demokratis.

Militer sebagai bagian dari masyarakat Indonesia atau bagian warga negara merupakan alat negara oleh karenanya posisi militer harus *dependent* (tergantung) pada keputusan pemimpin politik. Sebagai cermin dari kedaulatan rakyat otonomisasi militer dari sipil akan memberikan peluang untuk tidak bertanggung jawab apalagi harus tunduk pada kepemimpinan sipil. Sementara pihak militer beralasan kalau militer harus tunduk pada pemimpin sipil maka yang terjadi adalah politisasi militer (kontra subyektif) yang akan mengganggu statusnya sebagai *the guardian of the state*. Oleh karenanya militer lebih menghendaki hubungan yang bersifat *equal relationship* (hubungan setara), tidak ada yang menguasai dan dikuasai, tidak ada ordinat dan subordinat.

Ketidaktegasan dan belum adanya kata sepakat antara pihak sipil-militer dalam menafsirkan konsep hubungan sipil-militer, jelas akan berimplikasi pada model hubungan sipil-militer yang selanjutnya akan terjadi konflik kepentingan di antara sipil dan militer. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hubungan sipil-militer umumnya terletak dari model dan uraian dari model-model tersebut dimana dibutuhkan harmonisasi dalam kesetaraan “proporsional” yang disepakati melalui otoritas sipil, dimana militer harus profesional di bidangnya dan partisipasi sipil turut serta dalam mengelola pertahanan serta bersama-sama membangun model hubungan sipil-militer yang harmonis di Indonesia guna kepentingan Indonesia di masa depan dan membangun Indonesia Baru dengan format demokrasi serta adanya pengakuan dan diakui oleh masyarakat internasional.

Profesionalisme Militer

Mengutip pendapat Huntington yang menjelaskan bahwa profesional militer dapat terwujud apabila mereka tidak melakukan campur tangan di bidang politik. Huntington juga melihat ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam militer yang profesional, yakni:

1. Keahlian. Dalam kamus, ahli (*expertise*) adalah apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang tertentu (pengetahuan diperoleh dari lembaga pendidikan dan ketrampilan diperoleh dari lembaga profesi) dengan kata lain profesional diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.
2. Tanggung Jawab Sosial (*Social responsibility*). Tanggung jawab sosial seorang profesional dalam arti luas bahwa profesional militer adalah tanggung jawabnya perlindungan terhadap masyarakat dan negara. Client dari para profesional adalah masyarakat, untuk militer tanggung jawabnya adalah melindungi masyarakat
3. Kelompok / Lembaga (*Corporateness*). Kesadaran dan loyalitas anggota militer bahwa mereka adalah anggota dari suatu kelompok atau lembaga. Kunci dari profesi militer adalah kontrol dan ketrampilan. Secara organisatoris kontrol terhadap profesionalisme militer yang dilakukan dalam dua tingkatan. Pertama, para kolega mengamati kerekatan (kohesi) di antara para perwira sebagai profesional dan anggota suatu kelompok sosial.

Kelompok ini akan selalu mengamati apakah perilaku anggota militer, baik perilaku pribadi maupun sebagai profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedua, kontrol eksternal adalah hierarki komando. Perilaku dan kecakapan profesional dinilai dari ketaatannya terhadap perintah atasan. Dengan demikian jelas bahwa semakin tinggi tingkat keahlian seorang militer semakin tinggi tingkat profesionalismenya. Dalam arti lain menurut Huntington, semakin tinggi tingkat profesionalisme militer harus semakin jauh dari politik. Militer yang profesional harus selalu siap sedia melaksanakan putusan politik yang dilakukan oleh politisi sipil dan yang mempunyai legitimasi politik.

Untuk negara Indonesia pendapat Huntington terhadap profesionalisme militer juga masih berlaku. Pernyataan tersebut perlu telaah yang lebih luas mengingat sejarah politik dan militer di Indonesia. Kedua faktor tersebut sangat kental mewarnai profesionalisme militer di Indonesia. Kemauan politik (*political will*) dan dinamika internal TNI telah mendorong proses menuju profesionalisme. Namun kendala yang dihadapi untuk mewujudkan TNI yang profesional masih cukup banyak antara lain :

- Kebijakan dan strategi pertahanan yang kurang jelas. Pemahaman mengenai keamanan nasional yang ditafsirkan berbeda oleh para pelaku di lapangan bahkan sering berdampak kepada potensi konflik sesama pelaksana atau aparat keamanan di lapangan. Di sisi lain fakta sejarah yang memberikan peran militer dalam perang kemerdekaan dan perang antara daerah dan pusat mengakibatkan pemahaman mengenai keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh doktrin militer, persepsi militer sebagai penyelamat bangsa dan negara mendominasi interpretasi dan konsep keamanan negara.
- Budaya militer dalam masyarakat. Hegemoni budaya militer di masyarakat dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, meskipun hujatan yang ditujukan kepada TNI, tetapi perilaku sementara kalangan anggota masyarakat maupun perilaku organisasi masih banyak yang berwajah militeristik, sebagai contoh dapat kita lihat dari perilaku sebagian partai politik yang lebih mengutamakan pembentukan satuan tugas (SATGAS) partai yang militeristik dari pada membentuk kader partai yang mempunyai keterampilan dan kemampuan politik.
- Terbatasnya anggaran sektor pertahanan. Terbatasnya anggaran sektor pertahanan juga berpengaruh terhadap profesionalisme militer, hal tersebut dapat dilihat dari alat peralatan TNI yang dimiliki saat ini merupakan peralatan yang diproduksi tahun 1960-an sampai 1980-an. Bagaimana dapat mewujudkan militer yang profesional dengan peralatan seadanya dan program latihan yang minim? Warga sipil hanya kembali memberikan kritik atau pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya dapat dilihat di atas kertas dan di benak para pengamat yang senada dengan pemikiran untuk meningkatkan profesionalisme militer (Wiranatakusumah 2000).

Partisipasi Sipil Mengelola Pertahanan

Seperti telah dijelaskan di atas, dalam mewujudkan profesionalisme militer, perwira harus meninggalkan panggung politik dan meningkatkan profesionalismenya. Reformasi internal TNI harus diakui telah merubah paradigma TNI dengan dikembalikannya fungsi militer ke bidang pertahanan karena militer sebagai alat negara yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang pertahanan

sedangkan kebijakan itu dibuat oleh pihak lain seperti pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis. Dalam rangka partisipasi sipil dan pengelolaan pertahanan guna menata hubungan sipil militer yang harmonis dan demokratis harus ada program atau agenda yang disusun sesuai permasalahan yang ada. Sehingga partisipasi tersebut dapat dibangun dengan meningkatkan keahlian, keterlibatan, dan peran aktif sipil dalam wacana dan perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Agenda yang mendesak dan perlu segera dijadikan wacana publik adalah masalah kebijakan pertahanan, sistem pertahanan dan keamanan negara, doktrin pertahanan, rumusan ancaman, postur pertahanan, dan anggaran pertahanan. Sipil dalam hal ini adalah otoritas sipil seperti pemerintah, lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis, dan lembaga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintahan reformasi telah menghasilkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, yakni UU nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan negara dan UU nomor 2 tahun 2003 tentang POLRI. Perumusan kedua kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut dilakukan oleh *civilian authority*, dimana presiden dan menteri pertahanan sebagai otoritas sipil yang dibentuk secara demokratis. Kemudian dirumuskan buku putih pertahanan tahun 2003 dengan judul *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21* dan pelibatan komponen bangsa, termasuk LSM dan pakar politik dan militer dari institusi lain. Pemerintah maupun LSM tersebut mencerminkan keterlibatan langsung otoritas sipil dalam mengelola pertahanan. Aspek lain dari partisipasi sipil terhadap aspek pertahanan adalah koordinasi dan harmonisasi kebutuhan-kebutuhan pertahanan dengan prioritas nasional lainnya. Ini menuntut usaha guna mewujudkan keseimbangan antara kontrol sipil, efisiensi manajerial, dan keamanan. Agar kontrol sipil efektif, tuntutan agar mekanisme birokrasi menerapkan keputusan dari atas menyiapkan pekerjaan dalam koordinasi dengan menteri-menteri lainnya, mengaitkan tanggung jawab menteri pertahanan dengan komando militer, dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan militer pada menteri, menjadi sangat penting untuk diwujudkan guna membangun hubungan sipil-militer yang harmonis di masa mendatang.

Membangun Hubungan Sipil-Militer yang Harmonis.

Upaya untuk membangun format baru hubungan sipil-militer dalam masyarakat demokratis memerlukan landasan yang lebih fundamental. Prasyarat yang penting adalah terbentuknya pemerintahan demokratis yang mencakup *rule of law*, akuntabilitas publik dalam kaitan *delicate balance* tentang otonomi militer dalam kebijakan personel, penentuan tingkat kekuatan, masalah pendidikan, dan doktrin militer. Dalam rangka mencari dan merumuskan hubungan baru sipil-militer yang harmonis harus ada kemauan dari semua komponen bangsa yang berlandaskan kepada nilai moral dan sikap mental yang saling menghormati dan menghargai (*mutual respect*) dan saling bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Baru berdasarkan prinsip yang ditetapkan sesuai otoritas pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Penataan hubungan sipil-militer yang demokratis, harus melibatkan sipil dalam memikirkan dan merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang pertahanan. Sehingga hubungan sipil-militer yang harmonis harus dibangun dalam kerangka demokrasi dan adanya saling percaya dan saling bekerja sama guna membangun Indonesia baru. Hal ini akan menambah keseluruhan komponen bangsa yang terlibat baik sipil maupun militer harus saling berdampingan dan saling menghormati dalam profesi masing-masing dalam wadah demokrasi. Meskipun sipil lebih berpengaruh, ada pembahasan mengenai perbedaan sipil-militer yang tidak relevan lagi dibicarakan oleh kedua belah pihak apabila mereka masih saling curiga satu sama lain. Diharapkan pula pada masa yang akan datang tidak ada yang merasa lebih superior dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

- Andrews, Brandy M., 2008. "Patterns of Civil-Military Relations In Democracies", dalam School of Advanced Military Studies
- Bruneau, Thomas C., 2001. "Ministries Of Defense And Democratic Civil-Military Relations", dalam Naval Postgraduate School (US NPS)
- Crouch, Harold., 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hitrov, Todor Stoyanov, 2004, "Civil-Military Relations In Post-Communist Countries", dalam MA Thesis US NPS in Security Studies (Civil-Military Relations)
- Huntington, Samuel, 1957. *The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 1957.
- Johnson, Douglas dan Metz Steven, 1995. "American Civil-Military Relations : New issues, Enduring Problems", dalam US Army War Coll Monograph.
- Wiranatakusumah, Kisenda, 2000. "Civil-Military Relations In The Late Soeharto-Era"

Lectural Speech

- Abdullah, Amam. 2012., dalam matakuliah Militer dan Politik "Peran sipil-militer"